

# Radikalisme Dalam Pandangan Pancasila

## *Radicalism in the View of Pancasila*

Aidha Sarbilla Dwiyanti<sup>1</sup>, Ario Pamungkas, Alifia Zalfa Khabibah<sup>2</sup>, Adinda Nadia Azzahra<sup>3</sup>, Daffa Widyasari<sup>4</sup>

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul, Bekasi

[daffawsari04@student.esaunggul.ac.id](mailto:daffawsari04@student.esaunggul.ac.id)

### Abstrak

Radikalisme merupakan suatu paham atau gerakan yang menginginkan perubahan besar dalam tatanan sosial, politik, atau ekonomi melalui cara-cara yang ekstrim. Di Indonesia, radikalisme seringkali berhubungan dengan ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara, seperti Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai yang mengutamakan keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta pluralisme. Penelitian ini bertujuan menganalisis radikalisme dari perspektif Pancasila, serta melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat digunakan sebagai dasar untuk menangkal dan mengurangi ancaman radikalisme di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan memanfaatkan kajian literatur dan analisis konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa radikalisme bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila, terutama dalam hal penghormatan terhadap pluralisme dan toleransi antar umat beragama. Pancasila dapat menjadi instrumen efektif untuk membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis, serta mencegah penyebaran paham radikal yang mengancam stabilitas sosial dan politik negara. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari upaya bersama dalam menjaga kedamaian dan keutuhan negara. Sebagai nilai dasar negara, Pancasila mengajarkan pentingnya persatuan dalam keragaman yang merupakan antitesis dari pandangan radikal yang eksklusif dan diskriminatif. Melalui lima sila yang terkandung di dalamnya, Pancasila mengedepankan prinsip demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik dan sosial tanpa kekerasan.

**Kata Kunci:** Radikalisme, Pancasila, Pluralisme, Toleransi, Indonesia

## **Abstract**

*Radicalism is an ideology or movement that seeks significant changes in the social, political, or economic order through extreme measures. In Indonesia, radicalism is often linked to ideologies that conflict with the fundamental principles of the state, such as Pancasila. Pancasila, as the foundation of the Indonesian state, embodies values that prioritize social justice, humane and civilized treatment, and pluralism. This research aims to analyze radicalism from the perspective of Pancasila and explore how Pancasila's values can serve as a foundation for countering and reducing the threat of radicalism in Indonesia. The approach used in this study is qualitative, utilizing literature review and conceptual analysis. The findings indicate that radicalism contradicts the principles of Pancasila, particularly with regard to respect for pluralism and religious tolerance. Pancasila can be an effective tool in building an inclusive and harmonious society and preventing the spread of radical ideologies that threaten the social and political stability of the country. Therefore, it is essential for every citizen to understand and apply the values of Pancasila in everyday life as part of a collective effort to maintain peace and the integrity of the state. As the foundational national values, Pancasila teaches the importance of unity in diversity, which is the antithesis of exclusive and discriminatory radical views. Through the five principles enshrined in it, Pancasila advocates for democratic principles that involve all people in the political and social decision-making process without violence.*

**Keywords:** *Radicalism, Pancasila, Pluralism, Tolerance, Indonesia*

## **PENDAHULUAN**

Radikalisme merupakan suatu bentuk ideologi atau gerakan yang berusaha melakukan perubahan besar dalam tatanan sosial, politik, atau ekonomi dengan cara-cara ekstrem. Fenomena ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan, diskriminasi, dan eksklusivisme yang merusak integritas sosial. Di berbagai negara, termasuk Indonesia,

radikalisme sering berhubungan dengan ideologi yang bertentangan dengan dasar negara dan prinsip-prinsip universal kemanusiaan, termasuk hak asasi manusia, pluralisme, dan toleransi. Hal ini menjadi perhatian besar karena radikalisasi dapat mengancam stabilitas negara dan kehidupan sosial yang harmonis. Sebagai negara yang memiliki keragaman etnis, budaya, dan agama yang sangat tinggi,

Indonesia telah mendeklarasikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila, yang terdiri dari lima sila, mencerminkan nilai-nilai luhur yang mengutamakan persatuan dalam keragaman, keadilan sosial, penghargaan terhadap kemanusiaan, serta penghormatan terhadap pluralitas. Pancasila merupakan pedoman yang mengajarkan toleransi dan kerja sama antar golongan, yang mana nilai-nilainya diyakini dapat menjadi dasar yang kuat untuk menghadapi radikalisme yang berkembang di masyarakat (Rizal et al., 2022).

Radikalisme dan Pancasila memiliki hubungan yang sangat kontradiktif. Radikalisme cenderung mendorong ideologi yang mengabaikan pluralitas dan menginginkan perubahan sepihak yang mendalam, sementara Pancasila justru menekankan pentingnya keberagaman dan kesetaraan dalam kehidupan. Berbangsa dan bernegara. Ketika seseorang atau kelompok mengadopsi pandangan radikal, nilai-nilai seperti persatuan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap sesama manusia menjadi terabaikan. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan Pancasila secara konsisten di setiap lapisan masyarakat sangat penting untuk mencegah penyebaran radikalisme. Fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis radikalisme dari sudut pandang Pancasila dan mengidentifikasi bagaimana prinsip-

prinsip dasar Pancasila dapat digunakan untuk mencegah dan menanggulangi radikalisme di Indonesia. Dengan memahami teori dan konsep yang terkandung dalam Pancasila, kita dapat lebih mudah mengenali akar penyebab radikalisme dan membangun masyarakat yang lebih inklusif serta harmonis.

Pemahaman terhadap Pancasila ini sangat diperlukan agar masyarakat Indonesia dapat mengatasi tantangan radikalisme yang semakin kompleks di era modern (Satria et al., 2023).

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terungkap bagaimana Pancasila, sebagai nilai dasar yang memandu kehidupan berbangsa, mampu memberikan solusi terhadap ancaman radikalisme. Dengan pendekatan yang berbasis pada kajian literatur dan analisis konseptual, penelitian ini juga berupaya memberi pemahaman lebih lanjut mengenai relevansi Pancasila dalam membangun kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga keberagaman dan stabilitas sosial di Indonesia (Amtiran & Jondar, 2021).

## **TEORI**

### **Beberapa Pengertian Pancasila Menurut Para Ahli, Tokoh Sejarah, dan Sumber yang Ditemui**

#### **1. Pancasila sebagai. Dasar Negara (Soekarno)**

Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno, memberikan pandangannya tentang Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945,

beliau menyatakan bahwa Pancasila adalah ideologi dasar yang menyatukan bangsa Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Soekarno melihat Pancasila sebagai sintesis dari pemikiran-pemikiran yang ada pada masa itu, di antaranya nasionalisme, humanisme, dan sosialisme. Pancasila, bagi Soekarno, adalah pedoman hidup yang tidak hanya berkaitan dengan nilai-nilai moral dan etika, tetapi juga merupakan alat untuk menciptakan keharmonisan dan keadilan sosial dalam tatanan kehidupan bernegara.

## 2. Pancasila menurut M. Hatta

Dr. Mohammad Hatta, wakil presiden pertama Indonesia, menganggap Pancasila sebagai pedoman dalam pembangunan bangsa yang berbasis pada kemanusiaan dan kebijaksanaan. Bagi Hatta, Pancasila merupakan gagasan fundamental yang bertujuan untuk menciptakan sistem sosial dan politik yang adil bagi semua warga negara tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ataupun status sosial. Oleh karena itu, ia mengedepankan pentingnya Pancasila dalam menjaga integritas bangsa melalui nilai-nilai kebangsaan yang penuh dengan toleransi dan demokrasi.

## 3. Pancasila sebagai Falsafah Hidup Bangsa (Notonegoro)

Menurut Notonegoro, Pancasila adalah filsafat hidup bangsa Indonesia yang berisi prinsip-prinsip dasar tentang cara hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam segala bidang. Ia menganggap Pancasila sebagai pegangan yang memberi arah bagi kehidupan bangsa di semua

aspek, seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pancasila bertindak sebagai solusi untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kelestarian nilai-nilai tradisional Indonesia yang mengedepankan kesejahteraan bersama.

## 4. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka (Yudi Latif)

Dalam pandangan Yudi Latif, Pancasila merupakan ideologi terbuka yang selalu dapat berkembang dan disesuaikan dengan tuntutan zaman. Meskipun Pancasila memiliki prinsip-prinsip yang tetap dan tidak berubah, maknanya tetap hidup dalam dinamika perkembangan masyarakat dan zaman. Ideologi terbuka ini memberikan ruang bagi bangsa Indonesia untuk menyesuaikan pelaksanaannya sesuai dengan perkembangan zaman, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam lima sila Pancasila sebagai Sumber Hukum (Ahmad Soetanto)

Ahmad Soetanto menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara atau pandangan hidup, tetapi juga merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sebagai dasar hukum negara, Pancasila memberikan arahan dalam penyusunan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Setiap hukum yang dibuat harus mencerminkan dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, agar tujuan negara yaitu menciptakan keadilan sosial dapat tercapai (Hastangka & Ma'ruf, 2021).

## **Pancasila dalam Konteks Dasar Negara**

Pancasila dalam konteks dasar negara Indonesia bukan hanya berfungsi sebagai norma hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga sebagai filosofi yang menggambarkan pandangan hidup bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pedoman dalam menentukan arah pembangunan, baik sosial, politik, maupun ekonomi. Kelima sila dalam Pancasila mengandung berbagai nilai yang relevan dalam mencapai tujuan negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sebagai ideologi yang bersifat inklusif, Pancasila mengandung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kebebasan beragama, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, meskipun keberagaman yang ada. Pertama, sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" menggambarkan prinsip religiositas yang menjadi fondasi kehidupan sosial di Indonesia. Sila ini mengakui bahwa Indonesia merupakan negara dengan berbagai agama, namun tetap menegaskan bahwa negara ini mendasarkan dirinya pada keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dengan demikian, Pancasila mengajarkan bahwa keragaman agama seharusnya tidak menjadi pemecah belah, melainkan sebagai landasan bagi toleransi antarumat beragama. Dalam konteks dasar negara, sila ini memastikan bahwa hak beragama dilindungi tanpa adanya diskriminasi, dan setiap individu berhak untuk meyakini agama yang dipilihnya (Wulansari & Kiftiyah, 2024).

Sila kedua "Kemanusiaan

yang Adil dan Beradab" menjadi dasar penting dalam menjamin penghargaan terhadap hak asasi manusia. Pancasila tidak hanya mengutamakan kesejahteraan ekonomi dan sosial tetapi juga menekankan perlindungan terhadap martabat manusia. Ini menunjukkan bahwa negara Indonesia memandang setiap warga negaranya sebagai manusia yang memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dilanggar, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan tempat tinggal. Selain itu, prinsip ini juga mengajarkan kepada rakyat Indonesia untuk memiliki rasa kemanusiaan yang mendalam dalam berinteraksi dengan sesama, di dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya, sila ketiga "Persatuan Indonesia" menekankan pentingnya keharmonisan sosial dalam masyarakat yang multikultural seperti Indonesia. Sebagai dasar negara, sila ini mengingatkan seluruh bangsa Indonesia akan nilai persatuan, bahwa meskipun terdapat perbedaan etnis, budaya, agama, dan bahasa, bangsa Indonesia harus senantiasa bersatu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pancasila mengajarkan bahwa perbedaan yang ada bukanlah hambatan untuk membangun negara, melainkan sumber kekuatan dalam meraih cita-cita bersama. Dalam penerapan negara, sila ini mendorong nilai toleransi, musyawarah untuk mufakat, dan kerjasama antar berbagai lapisan masyarakat (Rani Dewi Kurniawati et al., 2024).

Sila keempat "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan"

merujuk pada prinsip demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah dan mufakat. Pancasila memandang demokrasi sebagai jalan untuk mencapai kesejahteraan rakyat tanpa menekankan pada sistem majoritarian semata. Dalam hal ini, Indonesia mengedepankan demokrasi yang diwarnai oleh proses musyawarah yang berorientasi pada kebijaksanaan, pertimbangan matang, serta keputusan yang mengakomodasi semua kepentingan yang ada di masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara mengharuskan segala keputusan yang dibuat harus bersifat inklusif dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kelima, sila kelima "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" menjadi penegasan terhadap pentingnya kesejahteraan sosial. Pancasila menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan dalam berbagai sektor kehidupan, baik pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya. Sebagai dasar negara, sila ini mengajak pemerintah untuk memperhatikan ketimpangan sosial dan mengatasi kemiskinan melalui kebijakan yang bersifat adil. Pancasila mendorong agar distribusi kekayaan dan sumber daya alam dilakukan secara merata dan adil tanpa mengabaikan kebutuhan dasar seluruh rakyat Indonesia (Auzi et al., 2024).

### **Pengertian Radikalisme**

Radikalisme, dalam konteks ideologis, sering muncul sebagai reaksi terhadap kondisi sosial-politik yang tidak adil atau tidak memadai. Pandangan ini berkembang dalam banyak bentuk, dari gerakan sosial hingga kelompok teroris, dan biasanya

bertujuan untuk mengganti sistem yang ada dengan sistem yang dianggap lebih adil menurut mereka. Radikalisme sering dihubungkan dengan ideologi politik atau keagamaan yang berlebihan dalam menanggapi keadaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini, dan hal ini cenderung menuntut perubahan dengan menggunakan cara-cara yang keras dan penuh kekerasan, bahkan sering mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penting untuk memahami bahwa radikalisme tidak hanya berkaitan dengan paham-paham ekstrem yang mengarah pada kekerasan, tetapi juga dengan pandangan yang menolak keberagaman atau pluralisme dalam masyarakat. Salah satu karakteristik utama dari radikalisme adalah penolakan terhadap pandangan atau cara hidup yang berbeda dari apa yang diyakini oleh penganut ideologi tersebut. Radikalisasi sering kali dilakukan dengan menggambarkan kelompok yang berbeda sebagai musuh atau ancaman yang harus dilawan. Hal ini seringkali berujung pada ketegangan sosial dan bahkan kekerasan antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Brahmana et al., 2023).

Di Indonesia, radikalisme memiliki akar sejarah yang sangat kompleks, terutama terkait dengan konflik-konflik yang melibatkan perbedaan agama, etnis, dan politik. Sebagai negara dengan keragaman budaya, agama, dan suku bangsa, Indonesia telah menjadi tempat munculnya beberapagerakan radikal yang berusaha menggantikan tatanan sosial yang ada. Seiring dengan itu, ada pula ideologi yang berusaha menempatkan satu agama atau

kelompok sosial lebih tinggi dari yang lainnya, sehingga memicu perpecahan dalam masyarakat. Dalam perspektif sejarah, radikalisme di Indonesia memiliki pola yang berulang terkait dengan upaya untuk mengubah kondisi sosial dengan cara-cara yang ekstrem dan kadang bersifat destruktif. Radikalisasi sering kali terjadi dalam konteks ketidakpuasan terhadap situasi politik dan ekonomi yang ada. Krisis ekonomi, ketidakadilan distribusi sumber daya, serta kegagalan sistem pemerintahan untuk memberikan solusi atas ketidaksetaraan sosial menjadi faktor pendorong munculnya radikalisasi. Banyak individu yang merasa terpinggirkan dan kecewa dengan cara-cara konvensional untuk mengubah keadaan, sehingga memilih jalur yang lebih ekstrem. Pengangguran, kemiskinan, dan ketidakadilan sering kali dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk merekrut. Anggota dan menyebarkan ideologi mereka yang menawarkan solusi instan melalui kekerasan atau perubahan drastis dalam struktur sosial (Muhammad & Widodo, 2022).

Radikalisme juga berkembang dalam hubungan antarnegara, yang dapat dipicu oleh sentimen keagamaan atau nasionalisme yang berlebihan. Beberapa kelompok radikal mungkin mengklaim bahwa mereka bertindak atas nama agama atau kelompok etnis tertentu untuk membela kehormatan mereka terhadap dunia luar. Pemahaman yang sempit mengenai agama atau ideologi lainnya menyebabkan kelompok radikal ini menciptakan pandangan dunia yang hanya melihat kebenaran dari perspektif mereka sendiri. Hal ini

meningkatkan potensi terjadinya pertempuran ideologis, yang berujung pada penolakan terhadap perbedaan dan kekerasan. Lebih lanjut, radikalisme yang tidak terkendali dapat merusak keharmonisan sosial, menciptakan ketegangan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya damai dapat terpecah belah, sementara pemerintah pun harus menghadapi tantangan dalam menangani penyebaran pemikiran radikal yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Oleh karena itu, penting untuk memiliki strategi yang efektif dalam mencegah dan mengurangi radikalisasi dengan pendekatan yang berbasis pada pendidikan, kesadaran multikultural, dan penegakan hukum yang adil (Satria et al., 2023)

#### .Pancasila dan Radikalisme

Pancasila, sebagai ideologi dasar negara Indonesia, memainkan peran yang sangat penting dalam membangun negara yang pluralistik, di mana keberagaman adalah keniscayaan. Radikalisme, yang sering kali membawa ideologi yang mengarah pada kekerasan dan intoleransi, sangat bertentangan dengan semangat yang terkandung dalam Pancasila. Salah satu aspek paling fundamental dari Pancasila adalah prinsip “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mengajarkan penghormatan kepada agama dan pemahaman bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih keyakinan tanpa paksaan. Dalam konteks ini, Pancasila menekankan kebebasan beragama yang sejalan dengan nilai-nilai toleransi yang dapat mencegah berkembangnya pandangan radikal yang menganggap kelompok

lain sebagai ancaman yang harus dilawan dengan kekerasan. Secara khusus, Pancasila mendorong terciptanya masyarakat yang berbasis pada pluralisme, yang berarti saling menghormati antar individu dan kelompok dengan berbagai latar belakang. Kelompok radikal sering mengabaikan keberagaman ini dan menekankan keunggulan satu pandangan di atas yang lainnya, sehingga menciptakan polarisasi yang merusak keharmonisan masyarakat. Dalam hal ini, nilai dasar Pancasila tidak hanya mendukung prinsip keadilan sosial, tetapi juga memperjuangkan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menghindari sikap eksklusif atau kebencian terhadap perbedaan. Radikalisasi, yang mengabaikan prinsip-prinsip dasar tersebut, berpotensi merusak kehidupan bersama yang telah lama dijaga dengan semangat kebhinnekaan (Amtiran & Jondar, 2021).

Pancasila sebagai landasan moral juga memberi arah yang jelas dalam menciptakan pemerintahan yang adil dan berpihak pada semua golongan tanpa memandang latar belakang mereka. Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak hanya cocok dengan nilai-nilai kemanusiaan universal, tetapi juga memberikan ruang untuk penyesuaian dalam menghadapi tantangan zaman. Prinsip yang terkandung dalam Pancasila memungkinkan Indonesia untuk menghadapi ideologi radikal dengan pendekatan yang berdasarkan pada kesetaraan dan kebebasan yang merata bagi setiap warganya, serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Gus Dur, dalam tulisannya, menjelaskan bahwa Pancasila mengajarkan pentingnya nilai-nilai

kesetaraan dan keterbukaan. Menurutnya, Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya ini tidak dapat hidup dalam keadaan intoleran. Pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila akan mengajarkan generasi penerus bangsa untuk menerima dan merayakan perbedaan, bukan malah memandangnya sebagai ancaman. Gus Dur menegaskan bahwa Pancasila menjadi fondasi moral yang dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di tengah arus modernisasi dan tantangan globalisasi yang semakin meluas, yang kadang dapat digunakan oleh kelompok radikal untuk menyebarkan paham mereka (Hastagka & Ma'ruf, 2021).

Radikalisasi sering kali mengandalkan ketakutan terhadap perbedaan dan menutupi pengakuan akan keragaman, sedangkan Pancasila justru merayakan keragaman tersebut. Dalam banyak kasus, kelompok yang terpapar oleh radikalisasi tidak diberi kesempatan untuk memahami atau merasakan manfaat dari keragaman budaya dan agama. Pancasila, melalui nilai toleransi dan demokrasi yang terkandung dalam prinsip-prinsipnya, mendorong masyarakat Indonesia untuk terbuka terhadap perbedaan. Dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dapat diselamatkan dari jebakan pemikiran sempit yang didorong oleh radikalisasi. Upaya untuk melawan radikalisasi di Indonesia dengan menggunakan Pancasila sebagai dasar ideologi negara tidak hanya berfokus pada aspek sosial dan politik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat jati diri bangsa. Pemahaman yang mendalam terhadap



nilai Pancasila akan menjadi benteng untuk melawan penyebaran ideologi ekstremis, karena Pancasila meletakkan dasar yang kokoh tentang bagaimana hidup bersama secara damai dalam keberagaman. Oleh karena itu, penerapan Pancasila dalam kebijakan negara, pendidikan, dan kehidupan sosial sangat penting sebagai upaya preventif terhadap radikalisme dan perpecahan dalam masyarakat (Wulansari & Kiftiyah, 2024).

### **Peran Pancasila dalam Mengatasi Radikalisme**

Banyak penelitian mengungkapkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat berfungsi sebagai penangkal radikalisme, terutama melalui penguatan karakter bangsa yang berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Secara konkret, Pancasila dapat dijadikan acuan untuk merancang kebijakan yang berbasis pada keberagaman dan dialog antar kelompok sosial dan agama. Negara-negara dengan dasar negara yang pluralistik cenderung lebih stabil dalam mengatasi radikalisme. Indonesia sebagai negara dengan Pancasila diharapkan mampu menjaga keseimbangan sosial melalui sistem politik dan pendidikan yang mengedepankan pemahaman tentang harmoni sosial di tengah perbedaan. Pancasila tidak hanya menjadi sebuah doktrin teoritis, melainkan juga prasyarat untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Dengan penerapan Pancasila yang konsisten dalam berbagai kebijakan sosial, pemerintah dapat membangun masyarakat yang tidak hanya toleran tetapi juga menyelesaikan

ketidakadilan sosial yang sering menjadi sumber radikalisme. Pancasila mengingatkan setiap individu untuk tetap memelihara prinsip demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai universal yang bertujuan memperbaiki kesejahteraan hidup Bersama (Rani Dewi Kurniawati et al., 2024).

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis hubungan antara radikalisme dan nilai-nilai Pancasila. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengeksplorasi konsep-konsep secara mendalam melalui pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yang relevan, seperti buku, artikel, jurnal, dan laporan penelitian terkait radikalisme, ideologi Pancasila, serta penerapannya dalam konteks sosial dan politik di Indonesia. Studi literatur digunakan untuk mengeksplorasi berbagai pandangan dan pemikiran para ahli tentang bagaimana Pancasila dapat berperan dalam menangkal radikalisme. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis literatur yang terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara, teori-teori radikalisme, serta berbagai penelitian terdahulu yang membahas tentang upaya-upaya pencegahan radikalisme melalui nilai-nilai ideologi Indonesia. Sumber data yang digunakan akan mencakup buku teks, artikel ilmiah, hasil penelitian, serta dokumen-dokumen dari lembaga-lembaga terkait yang relevan dengan topik penelitian. Semua data akan dikaji dengan menggunakan teknik analisis isi untuk menilai bagaimana Pancasila dapat berfungsi sebagai alat untuk

mengurangi radikalisme dalam konteks keberagaman sosial. Sebagai langkah berikutnya, hasil analisis literatur ini akan disajikan secara sistematis untuk memahami hubungan antara prinsip-prinsip Pancasila dengan fenomena radikalisme di Indonesia. Penelitian ini juga berusaha untuk menggali perspektif tentang efektivitas Pancasila dalam memitigasi radikalisme, serta melihat relevansi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di masa depan. Keseluruhan metodologi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana ideologi negara dapat dioptimalkan dalam menghadapi ancaman radikalisme di Indonesia (Auzi et al., 2024).

## **PEMBAHASAN**

### **Radikalisme di Indonesia: Penyebab dan Dampaknya**

Radikalisme di Indonesia sering dipicu oleh ketidakpuasan terhadap sistem sosial, ekonomi, dan politik yang ada. Ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan, akses terhadap pendidikan yang tidak merata, serta kegagalan negara dalam menjamin keadilan sosial sering menjadi akar masalah yang mendorong individu atau kelompok untuk mencari alternatif ekstrem. Radikalisme sering kali menjadi jalan keluar bagi mereka yang merasa terpinggirkan atau tidak mendapat perhatian dalam sistem yang ada. Kelompok-kelompok radikal ini berusaha menarik perhatian masyarakat melalui propaganda yang menawarkan solusi radikal untuk

masalah-masalah sosial dan ekonomi yang tidak terselesaikan, sering kali dengan menentang pemerintahan yang ada. Selain ketidaksetaraan sosial, faktor eksternal juga berperan dalam memperburuk masalah radikalisme di Indonesia. Globalisasi dan pengaruh media sosial membawa ideologi ekstrem dari luar negeri yang sangat mempengaruhi kelompok muda di Indonesia. Melalui platform online, paham radikal dengan mudah tersebar, yang disertai dengan narasi provokatif yang menggambarkan dunia hitam putih antara yang benar dan yang salah. Media sosial memberikan ruang yang lebih bebas bagi penyebaran informasi yang tidak terkontrol, termasuk doktrin yang bisa memotivasi individu atau kelompok untuk bergabung dalam gerakan ekstrem yang menuntut perubahan radikal melalui cara-cara kekerasan (Brahmana et al., 2023).

Radikalisme juga berhubungan erat dengan polarisasi sosial yang semakin tajam dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat yang sebelumnya hidup berdampingan dengan keberagaman mulai terfragmentasi akibat dari pengaruh pemikiran-pemikiran yang sempit. Ideologi yang menyebar melalui kelompok-kelompok tertentu dapat menyuburkan kebencian terhadap kelompok etnis atau agama lain. Hal ini berpotensi menciptakan ketegangan yang merusak hubungan antar warga negara yang beragam. Perbedaan dalam pandangan politik dan identitas agama yang berkembang pesat dapat memperparah situasi, menciptakan polarisasi yang semakin sulit dijumpai. Selain merusak struktur sosial, radikalisme juga berdampak serius pada aspek politik

Indonesia. Terorisme dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal dapat mengancam stabilitas politik negara. Di satu sisi, kelompok radikal mencoba menggantikan ideologi negara Pancasila dengan paham mereka yang sering kali menolak segala bentuk keberagaman dan pluralisme. Mereka menganggap Pancasila dan ideologi negara lainnya sebagai halangan untuk mencapai cita-cita mereka, sehingga menggunakan metode kekerasan atau pemberontakan sebagai sarana untuk menumbangkan sistem yang ada (Muhammad & Widodo, 2022).

Penyebaran ideologi radikal dalam masyarakat juga merusak pembangunan sosial yang telah lama diperjuangkan oleh negara Indonesia, seperti pendidikan, kesejahteraan ekonomi, dan pembangunan demokrasi. Dalam kondisi yang ekstrem, para pelaku radikalisme sering kali menarik pemuda yang belum cukup matang secara sosial dan politik untuk melakukan tindakan radikal. Ini menambah beban bagi pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan, pendidikan berkualitas, dan distribusi kesejahteraan yang merata untuk mencegah mereka dari pengaruh ideologi radikal. Namun, di balik tantangan tersebut, negara Indonesia tetap memiliki harapan besar dalam memerangi radikalisme melalui pendidikan, budaya inklusif, serta penguatan nilai-nilai Pancasila yang telah terbukti mampu menjaga keutuhan sosialbangsa. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi dan persatuan dalam keberagaman menjadi kunci dalam mengurangi daya tarik ideologi radikal. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam

menjaga integrasi sosial dan menyarankan alternatif yang lebih konstruktif untuk generasi muda, guna menjaga agar radikalisme tidak berkembang dalam masyarakat yang pluralistik in (Rizal et al., 2022).

### **Pancasila sebagai Alat untuk Mencegah Radikalisasi**

Prinsip keempat Pancasila, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan," memiliki peran krusial dalam menangkali radikalisme melalui demokrasi yang terbuka dan partisipatif. Pancasila mendorong setiap individu untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik melalui mekanisme demokrasi yang berbasis pada musyawarah dan mufakat. Pendekatan ini memperkuat peran dialog dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sosial, politik, dan ekonomi, daripada menempuh jalur kekerasan seperti yang dilakukan oleh kelompok radikal. Dengan memupuk rasa kepercayaan dan saling mendengar, Pancasila memberi ruang bagi perbedaan pendapat tanpa menimbulkan perpecahan. Prinsip kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Ketidakadilan sosial sering kali menjadi salah satu pemicu munculnya paham radikal, di mana kelompok yang merasa terpinggirkan atau tertindas merasa frustrasi dan tidak memiliki alternatif lain selain bergabung dengan kelompok ekstrem. Pancasila mengajarkan keadilan sosial dengan menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses yang

sama dalam pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Dengan memperkuat rasa keadilan, Pancasila dapat mengurangi kesenjangan sosial yang sering menjadi lahan subur bagi penyebaran radikalisme (Satria et al., 2023).

Selain itu, Pancasila menekankan pada pendidikan nilai-nilai luhur yang bersifat inklusif, dengan menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai keberagaman. Pendidikan Pancasila mengajarkan bahwa keragaman adalah bagian dari kekayaan yang harus dipelihara, bukan untuk dipertentangkan. Pendidikan ini dapat diterapkan sejak dini di sekolah-sekolah, serta di lingkungan masyarakat untuk membentuk karakter bangsa yang toleran dan sadar akan pentingnya keberagaman. Pendidikan berbasis Pancasila juga berperan sebagai sarana untuk menangkal paham-paham radikal yang mencoba merusak kebhinekaan dengan memupuk sikap saling pengertian antar kelompok. Secara lebih luas, Pancasila sebagai ideologi negara menyediakan kerangka bagi pembentukan kebijakan yang menanggulangi radikalisme melalui pendekatan yang menyeluruh, yaitu dengan meningkatkan dialog antar-agama, promosi toleransi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia, dengan landasan Pancasila, dapat menggagas kebijakan-kebijakan yang memfasilitasi upaya pemulihan bagi mereka yang telah terpapar paham radikal dengan menekankan nilai-nilai Pancasila sebagai basis dalam rekonsiliasi sosial. Kebijakan yang menciptakan kesempatan bagi dialog antargolongan. Akan mengurangi kemungkinan terjadinya marginalisasi

yang memperburuk kondisi sosial. Dengan melihat Pancasila sebagai dasar negara yang mengedepankan nilai-nilai humanisme, persatuan, dan keadilan, negara Indonesia memiliki alat yang kuat untuk mencegah dan menanggulangi radikalisme. Pancasila berperan bukan hanya sebagai fondasi hukum, tetapi juga sebagai pengarah moral yang memberi arah yang jelas bagi kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan bebas dari ekstremisme. Dalam hal ini, Pancasila dapat menjadi benteng yang melindungi negara dari ancaman radikal yang berusaha menghancurkan integritas sosial, politik, dan budaya bangsa (Amtiran & Jondar, 2021).

#### **Penerapan Nilai-Nilai Pancasila. untuk Menangkal Radikalisme**

Penerapan nilai-nilai Pancasila juga harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Pancasila mengajarkan prinsip gotong royong yang mendasari kerjasama antar individu dan kelompok dalam memecahkan berbagai masalah bersama. Dalam konteks ini, masyarakat bisa berperan sebagai agen perubahan yang turut serta dalam membangun rasa kebersamaan dan solidaritas. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial yang positif dapat mengurangi ruang bagi ideologi radikal untuk berkembang, karena adanya kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga persatuan dan harmoni antar sesama. Salah satu aspek penting dari penerapan Pancasila adalah memberikan perhatian lebih kepada kebijakan publik yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kemiskinan. Ketidakadilan sosial yang dibiarkan

berkembang dapat memicu ketidakpuasan yang akhirnya membawa beberapa individu atau kelompok menuju paham radikal. Oleh karena itu, kebijakan yang menciptakan kesejahteraan sosial sesuai dengan sila kelima dalam Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," berfungsi tidak hanya untuk memastikan kehidupan yang lebih baik bagi rakyat, tetapi juga untuk menekan faktor-faktor yang dapat memicu radikalisme (Hastangka & Ma'ruf, 2021).

Pada tingkat individu, penerapan nilai-nilai Pancasila dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari dengan cara memperlakukan sesama dengan adil, menghormati perbedaan, dan selalu berusaha mencari solusi damai dalam memecahkan masalah. Ketika prinsip-prinsip Pancasila diterapkan dalam kehidupan pribadi, setiap orang dapat bertindak sebagai agen toleransi di lingkungannya masing-masing. Jika nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, saling menghargai, dan persatuan menjadi pedoman hidup sehari-hari, maka upaya penanggulangan radikalisme dapat berjalan dengan efektif, karena radikalisme tidak akan berkembang di lingkungan yang mendukung keberagaman dan perdamaian. Lebih jauh, peran pemimpin politik dan masyarakat sangat penting untuk membangun masyarakat yang berlandaskan pada Pancasila. Pemimpin yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan ini dapat menjadi contoh teladan dalam menjunjung tinggi prinsip keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Kepemimpinan yang mengedepankan prinsip tersebut akan mampu menciptakan ruang diskusi

yang sehat dan produktif dalam menjawab berbagai permasalahan bangsa, termasuk soal keberagaman, yang pada gilirannya akan dapat menangkal. Paham radikal yang menjanjikan solusi melalui kekerasan (Wulansari & Kiftiyah, 2024).

Dengan memaksimalkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, dan negara, akan tercipta lingkungan yang mendukung perdamaian. Kolaborasi antarindividu, masyarakat, dan negara dalam menerapkan Pancasila secara holistik merupakan langkah yang sangat strategis untuk menciptakan keharmonisan sosial yang melindungi bangsa dari ancaman ideologi radikal. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia menawarkan solusi yang tepat dan efektif untuk mencegah terjadinya radikalisme dan menjaga keutuhan negara. Penerapan nilai-nilai Pancasila juga membutuhkan keteguhan dalam menegakkan hukum dan keadilan di seluruh lapisan masyarakat. Sebagai dasar negara yang bersifat inklusif dan toleran, Pancasila harus dijadikan acuan dalam setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan demikian, penerapan Pancasila akan menciptakan ketertiban dan kedamaian, sekaligus melindungi masyarakat dari bahaya radikalisme yang dapat merusak keharmonisan dan nilai-nilai luhur yang telah diajarkan oleh para pendiri bangsa (Rani Dewi Kurniawati et al., 2024).

## KESIMPULAN

Kesimpulannya, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran yang sangat krusial dalam mencegah radikalisasi di dalam masyarakat. Dengan prinsip-prinsipnya yang menjunjung tinggi pluralisme, kemanusiaan, dan keadilan sosial, Pancasila memberikan dasar yang kokoh bagi terciptanya kedamaian dan persatuan dalam menghadapi beragam tantangan sosial, termasuk ancaman radikalisasi. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti penghargaan terhadap perbedaan dan penolakan terhadap kekerasan, menjadi kunci utama untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, toleran, dan harmonis, sehingga mencegah berkembangnya pemikiran radikal yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Penerapan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, melalui pendidikan, kebijakan publik, peran media, serta keterlibatan aktif masyarakat, menjadi langkah efektif untuk menjaga Indonesia tetap stabil dan aman dari pengaruh ideologi ekstrem. Mengingat pentingnya pendidikan dan peran aktif semua elemen masyarakat, keberlanjutan dan kesuksesan dalam menerapkan prinsip Pancasila akan dapat menjamin kedamaian dan persatuan bangsa Indonesia, sekaligus memperkuat semangat gotong royong sebagai modal utama untuk mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi, termasuk dalam menangkal radikalisasi yang dapat mengancam keberagaman dan persatuan yang telah lama terjaga.

## Daftar Pustaka

Amtiran, A. A., & Jondar, A. (2021). *KEBIJAKAN ANTI RADIKALISME*

*DUNIA PENDIDIKAN DITINJAU DARI PANCASILA DAN SOLUSINYA.* 1(2).

<https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/179>

Auzi, C., Saragi, D., & Ndona, Y. (2024). Peran Pendidikan Pancasila dalam Mencegah Radikalisme pada Kalangan Siswa Sekolah Dasar. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 4(02), 721–729. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v4i02.4795>  
<https://jurnal.itscience.org/index.php/educendikia/article/view/4795>

Brahmana, K. P. S., Siahaan, P. G., Purba, N. R., Lumban Gaol, R., Sihite, R. A., & Simatupang, Y. E. (2023). Aktualisasi Pancasila di SMA dalam Menanggulangi Radikalisme Atas Sikap Fanatisme Beragama. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 5(6), 2478–2487. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i6.5751>  
<https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/5751>

Hastangka, H., & Ma'ruf, M. (2021). Metode Pancasila dalam Menangkal Radikalisme. *Jurnal Kewarganegaraan*, 18(2), 115. <https://doi.org/10.24114/jk.v18i2.23538>  
<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jk/article/view/23538>

Muhammad, R., & Widodo, S. (2022). Implementasi Pancasila Untuk Mencegah Isu Radikalisme Dalam Bingkai Kebhinekaan. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 14(1), 57–65. <https://doi.org/10.21137/jpp.2022.14.1.8>  
<https://ejournal.stkippacitan.ac.id/ojs3/index.php/jpp/arti cle/view/423>

Rani Dewi Kurniawati, Nuraeni, Y., & Zuraidah. (2024). TERORISME, RADIKALISME DAN KHILAFAH DI NEGARA DEMOKRASI

PANCASILA. *Journal Presumption of Law*, 6(2), 222–233.  
<https://doi.org/10.31949/jpl.v6i2.10939>

<https://www.researchgate.net/publication/385262870> TERORISME RADIKALISME DAN KHILAFAH DI NEGARA DEMOKRASI PANCASILA THE CALIPH ERRORISM RADICALISM AND THE CALIPH HATE IN A PANCASILA DEMOCRATIC STATE

Rizal, M., Budiman, F., Salsabilla, A. R., Gunawan, M. A., & Nugraha, R. G. (2022). PENERAPAN NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI SEBAGAI UPAYA MENANGKAL RADIKALISME. *Jurnal. Kewarganegaraan*, 6(1).  
<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2891> Satria, B. M., Nizar Alif, M. F., Bima Cahya, R. M., &

Margaretha Sutomo Putri, A. (2023). Upaya Pencegahan Potensi Radikalisme dengan Penanaman Ideologi Pancasila di Lingkup Sekolah. In *Journal of Education Research* (Vol. 4, Issue 1).  
<https://jer.or.id/index.php/jer/article/view/118>

Wulansari, F., & Kiftiyah, A. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dan Moderasi Agama Sebagai Upaya Menangkal Gerakan Radikal di Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(1), 91–104.  
<https://doi.org/10.52738/pjk.v4i1.158>  
<https://ejournalpancasila.bpip.go.id/index.php/PJK/article/view/158>